

DINAMIKA PERSYARIKATAN DALAM AKTUALISASI BERBANGSA DAN BERNEGARA (Studi Kasus Peran dan Kontribusi Warga Persyarikatan)*

Oleh : Drs. H. Sri Purnomo, M.Si**

Tamhid

Saya sangat apresiatif atas undangan diskusi panel pada hari ini, lebih-lebih dirancang oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Pustaka dan Informasi dan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Magelang dengan tema Muhammadiyah di Tengah Pusaran Politik Nasional. Kepada saya diamanati untuk menyampaikan pengalaman atau *testimoni* selama menjadi wakil bupati.

Sebelumnya saya ingin memberikan *tamhid* (pendasaran) atas kebijakan Muhammadiyah terhadap pilkada. Dalam rekomendasi sidang Tanwir Muhammadiyah di Mataram tahun 2004 pada poin pertama tertulis bahwa menyikapi akan berlangsungnya pilkada secara langsung, maka Muhammadiyah perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan kondisi masing-masing tempat (daerah) dalam rangka amar maaruf nahi munkar (Lihat rekomendasi Tanwir Muhammadiyah di Mataram 2004).

Pilkada dan kedudukan jabatan kepala daerah bagian dari wilayah politik. Muhammadiyah memandang bahwa posisi dan fungsi politik selain salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) juga sebagai wahana atau alat untuk membangun kehidupan, dimana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan dan keadaban untuk terwujudnya "*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*" (Lihat khittah Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara pada alenia 1-2, tahun 2002).

Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politiknya secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswatun hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). (Lihat khittah Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara pada alenia 10, tahun 2002).

Atas dasar itu perkenankan saya berbagi pengalaman (*experience sharing*) dengan memulai saat proses pemilihan pilkada 2005 di Sleman hingga pengalaman mengelola pemerintah daerah sampai hari ini, dalam posisi saya sebagai orang kedua.

* Disampaikan dalam Panel Diskusi "Muhammadiyah di Tengah Pusaran Politik Nasional (Kasus Pemilu dan Pilkada)" oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Pustaka dan Informasi di Universitas Muhammadiyah Magelang, Tanggal 9 Agustus 2008.

** Wakil Bupati Sleman, DIY.

Pilkada 2005 Sebuah Pengalaman

- Diskripsi tentang daerah Kabupaten Sleman yang strategis (sebagai metropolis, pusat pendidikan dan kebudayaan. Serta meraih berbagai prestasi antara lain : indeks pembangunan manusia terbaik se-Indonesia, usia harapan hidup tertinggi se-Indonesia, posisi bandara DIY di Sleman, PAD tertinggi se-DIY, wilayah cultural yang menjanjikan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah yang selama ini diklaim oleh “pihak lain” sebagai sentra gerakan kulturalnya.
- Rekrutmen kekuasaan eksekutif dengan pemilihan langsung pertama
Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Persyarikatan yang merekomendasikan saya untuk maju menjadi salah satu calon wakil bupati Sleman pada periode 2005 - 2010. Moment tersebut adalah pilkada secara langsung untuk yang pertama. Proses rekomendasi dari Persyarikatan sebetulnya dijarah dari bawah ke atas (*bottom up*) muncul 30 nama. Dari jumlah itu kemudian Persyarikatan di tingkat Daerah memberikan tiga calon untuk berlaga di pilkada melalui partai. Namun dua orang calon yang direkomendir oleh persyarikatan tidak berani maju. Sehingga tinggal satu satunya calon adalah saya maju sesuai dengan amanat Persyarikatan. Tetapi di tengah kondisi konstalasi politik yang kritis, kendaraan partai yang direkomender “memaksa” saya dengan calon yang kurang diminati oleh warga Persyarikatan. Sehingga Persyarikatan merubah rekomendasinya dan mendorong untuk maju dengan pasangan *incumbent*. Calon dari *incumbent* meminang saya dan Persyarikatan memberikan dukungannya. Akhirnya dengan dukungan Persyarikatan serta ridhoNya kursi bupati dan wakil bupati periode 2005 -2010 dapat kita menangkan.
- Posisi wakil kepala daerah (bupati) dari kacamata regulasi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebatas membantu, memantau, memberikan saran dan melaksanakan tugas. Tidak dalam posisi penentu kebijakan. Pasal 26 dari undang-undang tersebut menugaskan wakil kepala daerah (wakil bupati) dalam hal :
 1. **Membantu** kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 2. **Membantu** kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menidaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemerdayaan perempuan dan pemuda,serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
 3. **Memantau** dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa.

4. **Memberikan saran** dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
 5. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya **yang diberikan** oleh kepala daerah.
 6. Melaksanakan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah **berhalangan**.
- Dalam keterbatasan tersebut, saya memaksimalkan sekecil apapun peluang pada saya terutama dalam kerja-kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Pada posisi inilah kontribusi yang bisa saya berikan pada persyarikatan misalnya membangun gedung, memperlancar perizinan dan komunikasi religius atau pengajian berkala dan lain-lain.

Penutup

Keterbatasan ruang dan kewenangan pada saya, serta maksimalisasi peluang yang ada, tentu saja belum memuaskan semua pihak, terutama Persyarikatan. Sehingga mungkin posisi saya dimaknai seperti “macan ompong”. Hal itu semata-mata kewenangan sebagai orang nomor dua di pemerintah daerah terbatas. Namun demikian, komunikasi yang kita bangun selama ini dengan persyarikatan cukup baik. Ke depan, selain ada pengajian, tentu perlu didesain pertemuan “setengah kamar” dengan pimpinan persyarikatan di tingkat wilayah. Hal itu penting agar persoalan-persoalan strategis, aktual dan solutif yang terjadi di ranah Persyarikatan, umat, bangsa, pemerintah dan legeslatif bisa mencerahkan masyarakat Sleman, khususnya jamaah Muhammadiyah.

Pilkada Sleman 2010 di depan mata. Jika saya di dorong maju oleh Persyarikatan jawaban saya, insya Allah saya siap. Tentu saja dukungan pimpinan dan warga Muhammadiyah diharapkan bulat seratus persen. Jika hasil pilkada 2005 pasangan Ibnu dan Sri memenangkan pilkada di Sleman, walaupun Sri Purnomo pada posisi orang kedua. Pada waktu itu posisi ini sebagai sebuah strategi paling tepat. Namun untuk pilkada 2010, apakah sudah saatnya orang Muhammadiyah mengambil posisi orang nomor satu ? Jawabnya kita serahkan pada Persyarikatan. Saya *sami'na wa atha'na*.

Sleman, 9 Agustus 2008

Drs. H. Sri Purnomo, M.Si